

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dimana sektor pertanian menjadi sektor yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Pembangunan sektor pertanian merupakan prioritas utama di Indonesia, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan komitmen tinggi terhadap pembangunan ketahanan pangan sebagai komponen strategis pembangunan nasional. Selain itu, mayoritas mata pencarian masyarakat Indonesia adalah di sektor pertanian. Krisis pangan merupakan isu strategis dunia saat ini, ketidakseimbangan antara peningkatan populasi penduduk dengan ketersediaan lahan pemukiman memunculkan masalah yang menyebabkan adanya alih fungsi lahan, sedangkan kebutuhan pangan meningkat tajam. Akibatnya lahan produktif yang seharusnya digunakan untuk lahan pertanian dikonversi menjadi lahan non pertanian. Hal ini diiringi dengan masalah perubahan iklim yang berdampak terhadap menurunnya produktifitas dan menurunnya kualitas hasil panen (Panudju, 2013).

Berdasarkan Buku Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035 dalam Rancangan Teknokratik RPJM 2015-2019 (2015:136) diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2020 mencapai 271.066.400 jiwa, maka kebutuhan pangan khususnya beras yang harus disediakan juga cukup besar. Berdasarkan UU No.18 tahun 2012 tentang pangan, pemerintah bertanggung jawab penuh mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dan konsumsi pangan bagi penduduk secara berkelanjutan dan negara wajib menjalankan kedaulatan pangan (hak rakyat terhadap pangan). Kewajiban dimaksud mencakup kewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang.

Bagi Indonesia, pangan sering diidentikan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1997/1998, yang berkembang menjadi krisis multi

dimensi, telah memicu kerawaan sosial dan membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas sosial (Bulog, 2014).

Nilai strategis beras juga disebabkan karena beras adalah makanan pokok paling penting. Industri perberasan memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi (dalam penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan dan dinamika ekonomi perdesaan, sebagai *wage good*), lingkungan (menjaga tata guna air dan kebersihan udara) dan sosial politik (sebagai perekat bangsa, mewujudkan ketertiban dan keamanan). Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi kalori, protein, lemak dan vitamin (Bulog, 2014).

Pertimbangan tersebut menjadi alasan pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografi yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar (Bulog, 2014).

Dilihat dari hirarkinya ketahanan pangan mencakup ketahanan pangan nasional, ketahanan pangan regional dan ketahanan pangan rumah tangga. Salah satu aspek penting dalam ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan. Penyediaan pangan dapat berasal dari produksi dalam negeri atau dari impor. Sebagai suatu Negara Kepulauan dengan penduduk besar maka penyediaan pangan harus semaksimal mungkin berasal dari produksi dalam negeri (swasembada) dan tidak bergantung kepada pangan impor (Saragih, 2010).

Ketahanan pangan sangat terkait dengan aspek kemiskinan. Kemiskinan mempunyai dimensi yang luas, namun yang utama adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan bagi kehidupan yang layak, sehingga pemenuhan kebutuhan pangan merupakan salah satu langkah strategis dalam pengentasan kemiskinan (Saragih, 2010).

Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, tentu akan menyebabkan penurunan produksi pertanian termasuk menurunnya produksi beras. Untuk itu Kementerian Pertanian melalui buku cetak sawah baru 2013 menyatakan ekstensifikasi pertanian perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan produksi hasil pertanian dan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu, pemerintah melalui RPJPMN tahap-2 (2010-2014) menyebutkan bahwa salah satu target sukses pembangunan pertanian adalah mencapai swasembada berkelanjutan tanaman pangan.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) produktivitas padi di Kabupaten Solok tahun 2016 sebesar 5,73 ton/Ha dengan luas panen 62.193 Hektare, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar 5,67 ton/Ha dengan luas panen 64.533 Hektare. Menurut Sudarsono *et al* (2012) tingkat produktivitas padi di Kabupaten Solok tersebut masih tergolong rendah di bandingkan dengan potensi hasil yang dapat mencapai 6-7 ton/ha. Buharman *et al* (2013) juga menyatakan dalam rangka menuju surplus produksi beras nasional sebesar 10 juta melalui melalui Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) khusus untuk Kabupaten Solok, di fokuskan pada 2 Kecamatan, salah satunya Kecamatan Bukit Sundi.

Dalam upaya ekstensifikasi lahan pemerintah pada tahun 2006-2010 telah membentuk Direktorat Jenderal Pengolahan Lahan dan Air (PLA) yang salah satu tugas dan fungsinya untuk mengelola perluasan areal tanam beberapa komoditi termasuk padi. Dengan fokus kegiatan pada daerah luar Jawa. Dengan hasil cetakan sebanyak 69.102 Ha. Selanjutnya tahun 2011 disediakan anggaran untuk pencetakan lahan seluas 69.102 Ha, dan terus meningkat menjadi 100.000 Ha setiap tahunnya sejak tahun 2012. Pencetakan ini difokuskan untuk wilayah luar pulau Jawa. Program ini tentu diharapkan dapat meningkatkan produksi padi nasional guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Program pencetakan sawah baru merupakan program yang membantu kelompok tani yang berniat untuk memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan sawah.

Dalam hal ini, pemerintah membantu pendanaan pelaksanaan pembukaan lahan sawah dengan proses dan ketentuan yang sudah ditentukan. Pelaksanaan program ini dibantu oleh TNI AD dalam upaya penguatan lembaga dan percepatan penyelesaian fisik dilapangan. Program ini dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana di bidang pertanian (Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, 2014).

Program pencetakan sawah baru diharapkan dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dibanding sebelum adanya program tersebut. Melalui program ini di harapkan terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, optimalisasi jam kerja, pemanfaatan lahan dan peningkatan pendapatan petani. Selain itu peningkatan produksi beras merupakan salah satu tujuan pelaksanaan program pencetakan sawah baru ini, melalui program ini di harapkan dapat dicapai swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional.

Upaya pemerintah dalam pelaksanaan perluasan lahan sawah melalui program pencetakan sawah baru di bayangi dampak negatif terhadap lingkungan berupa kerusakan ekosistem dan habitat alami pada lahan-lahan tertentu. Selain itu, penambahan luas baku lahan sawah tentu akan meningkatkan jumlah biaya produksi dan jam kerja petani jika dibandingkan dengan kondisi awal petani sebelum mendapatkan program. Dengan demikian tentu penambahan biaya produksi dan jam kerja akan mempengaruhi keuntungan petani baik itu terjadi peningkatan keuntungan atau justru mengalami kerugian jika di bandingkan dengan kondisi awal petani sebelum mendapatkan program. Apabila mengalami kerugian, hal tersebut tentu mempengaruhi keberlanjutan program pencetakan sawah baru.

Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan terintegrasi dalam rangka pencapaian surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014 melalui perluasan areal dan pengelolaan lahan, peningkatan produktifitas, penurunan konsumsi beras dan penyempurnaan manajemen. Sebagai salah satu pilar, Kementerian Pertanian berharap agar perluasan areal tanaman pangan mampu menumbuhkan sentra pangan baru di berbagai wilayah yang dikelola secara ekonomis sehingga cadangan pangan

nasional dapat diperkuat, lapangan kerja dan kesempatan berusaha dapat tercipta, dan akhirnya dapat menempatkan petani dan pertanian rakyat menjadi soko guru perekonomian Indonesia.

Harapan tersebut bisa menjadi kenyataan jika sawah yang telah dicetak melalui program pencetakan sawah baru tersebut memang dimanfaatkan oleh petani sesuai dengan ketentuannya yaitu memenuhi Indeks Pertanaman (IP) minimal 2. Pemanfaatan itu sendiri setidaknya dipengaruhi oleh tiga hal yakni kelayakan lahan, sumberdaya petani (pengetahuan dan keterampilan berusahatani) serta ketersediaan modal. Penelitian yang dilakukan oleh Astuti dkk (2016) menemukan bahwa diprediksi akan ada kendala yang terkait dengan SDM petani dimana didapati bahwa 51,50% petani penerima program ternyata memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kurang dalam berusahatani padi sawah. Namun hal ini tentu bisa diselesaikan jika penyuluh pertanian memainkan perannya dengan optimal.

Kondisi diatas menjadi dasar akan pentingnya penelitian mengenai pemanfaatan lahan hasil program pencetakan sawah baru ini dilakukan. Jawaban dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan penyempurnaan program, agar dana yang telah dikurangkan oleh pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan produksi padi nasional guna mendukung ketahanan pangan nasional.

B. Rumusan Masalah

Untuk mewujudkan program swasembada pangan dan ketahanan pangan tentu perlu diadakan perluasan lahan. Mengingat intensifikasi saja tidak cukup memberikan solusi, maka perlu di adakan perluasan lahan untuk tanaman pangan. Program pencetakan sawah baru datang untuk mendukung mewujudkan program ketahanan pangan. Melalui bantuan dalam bentuk dana untuk pembukaan sawah baru di daerah/lahan yang sebelumnya tidak termanfaatkan.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang menjadi sasaran program pencetakan sawah baru, hal ini mengingat masih banyaknya potensi lahan yang dapat dimanfaatkan menjadi sawah baru. Lahan-lahan potensial digolongkan tersedia

apabila penggunaan lahannya belum digunakan untuk pertanian maupun penggunaan lainnya yang bersifat permanen, yaitu berupa belukar atau hutan yang dapat dikonversi. Data Badan Litbang Pertanian 2007 menunjukkan luas lahan yang berpotensi untuk perluasan sawah diseluruh Indonesia seluas 8,28 juta Ha, terdiri atas potensi sawah rawa 2,98 juta Ha dan sawah non-rawa 5,30 juta Ha. Upaya penambahan lahan tanaman pangan melalui pencetakan sawah baru menjadi penting dalam upaya mempercepat pencapaian surplus beras.

Program pembangunan ekonomi yang umumnya berlandaskan pada program pembangunan pertanian tentu memiliki tujuan untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat yang menjadi target program pembangunan tersebut. Dalam hal ini salah satunya adalah program pencetakan sawah baru, yang memiliki tujuan menambah luas baku lahan sawah. Penambahan luas baku lahan diadakan pada lahan yang tidak termanfaatkan sebelumnya. Hal tersebut tentu secara tidak langsung menyisipkan tujuan pengentasan kemiskinan, melalui penyerapan tenaga kerja yang kemudian memberikan pekerjaan baru bagi masyarakat. Serta peningkatan pendapatan petani melalui hasil produksi dalam usahatani yang dilakukan di sawah baru hasil program pencetakan sawah baru.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat, ada beberapa kabupaten yang melaksanakan program pencetakan sawah baru (Lampiran 1). Dari data tersebut total luas lahan yang menjadi target program pencetakan sawah baru Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 adalah seluas 1.058 ha (Lampiran 1). Salah satunya Daerah Kabupaten Solok yang terbagi dua kecamatan yaitu Kecamatan Hiliran Gumanti dan Kecamatan Bukit Sundi dengan total luas lahan seluas 13 Ha. Daerah Hiliran Gumanti melaksanakan program cetak sawah baru di Nagari Sungai Abu pada kelompok tani Usaha Keluarga Organik dengan perencanaan luas lahan sawah baru yaitu seluas 7 Ha. Sementara di daerah Bukit Sundi melaksanakan program cetak sawah baru di Nagari Dilam Jorong Kapalo Koto pada kelompok tani Tunas Harapan dengan perencanaan luas lahan sawah baru yaitu seluas 6 Ha (Lampiran 2), namun realisasi di lapangan luas lahan cetak sawah baru di Nagari Dilam yaitu seluas 6,39 ha melebihi luas lahan yang direncanakan.

Jorong Kapalo Koto Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok merupakan daerah yang cetak sawah barunya telah melakukan musim tanam 2 kali yaitu, pada bulan Maret 2017 melakukan tanam pertama, panennya pada bulan Juli dan pada bulan September 2017 melakukan tanam kedua dan panen pada bulan Januari 2018. Menurut prasurey yang dilaksanakan topografi lahannya berbukit dengan tingkat kemiringan di atas 10% atau 1100 mdpl dan belum terbentuknya lapisan tapak bajak di tanah cetak sawah baru tersebut. Masalah tersebut menyebabkan waktu panennya menjadi lama dan mengindikasikan adanya kendala atau masalah dalam pemanfaatan lahan tersebut. Semua kendala atau masalah yang di hadapi petani selama pemanfaatan lahan tersebut akan berpegaruh kepada hasil produksinya.

Berhasil atau tidaknya program cetak sawah baru akan memberikan dampak yang cukup berarti bagi perkembangan pertanian sawah di Kecamatan Bukit Sundi terutama terkait peningkatan produksi beras serta peningkatan pendapatan petani responden yang tergabung dalam program cetak sawah baru ini.

Berdasarkan kondisi tersebut peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian. Dari permasalahan diatas maka pertanyaan penelitian sebagai berikut : Bagaimana gambaran pelaksanaan kegiatan usahatani pada sawah baru hasil program pencetakan sawah baru di Jorong Kapalo Koto Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, apakah pendapatan petani meningkat, dan bagaimana kendala atau masalah yang dihadapi oleh petani dalam pemanfaatan sawah baru di Jorong Kapalo Koto Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Usaha Tani pada Lahan Sawah Baru di Jorong Kapalo Koto Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok ”**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Mendeskripsikan profil usahatani pada lahan sawah baru di Jorong Kapalo Koto Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.
2. Menganalisis pendapatan usahatani padi sawah pada lahan sawah baru di Jorong Kapalo Koto Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.
3. Menganalisis kendala atau masalah yang dihadapi oleh petani dalam pemanfaatan lahan sawah baru di Jorong Kapalo Koto Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan menjadi proses pembelajaran dalam memahami fenomena sosial di lapangan. Selain itu diharapkan penelitian ini bisa menambah literatur di bidang pendidikan terutama mengenai pemanfaatan program pencetakan sawah baru.
2. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan sasaran dari program-program pembangunan pertanian kedepan.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi wacana dan menambah pengetahuan bagi masyarakat umum.

